

## **KURIKULUM PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA**

**<sup>1</sup>Vinni Dini Pratiwi, <sup>2</sup>Guwi Nirna Igari, <sup>3</sup>Habib Rizky, <sup>4</sup>Vinna Dinda Kemala**

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Budidaya Binjai*

[<sup>1</sup>vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id](mailto:vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id)

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Budidaya Binjai*

[<sup>2</sup>guinirna@gmail.com](mailto:guinirna@gmail.com)

<sup>3</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Budidaya Binjai*

[<sup>3</sup>habibgeming992@gmail.com](mailto:habibgeming992@gmail.com)

<sup>3</sup>*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

[<sup>4</sup>vinnadindakemala@umsu.ac.id](mailto:vinnadindakemala@umsu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pentingnya kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda. Pendidikan politik merupakan elemen kunci dalam pembentukan warga negara yang aktif, kritis, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kajian ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan politik yang efektif harus mencakup pengetahuan dasar tentang sistem politik, keterampilan berpikir kritis, partisipasi politik praktis, serta relevansi dengan isu-isu sosial dan politik kontemporer. Selain itu, literasi digital juga menjadi bagian penting dari pendidikan politik di era informasi yang penuh dengan tantangan misinformasi. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan literatur review, merupakan suatu metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisible untuk melakukan identifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan politik di Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal relevansi materi dan pendekatan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap politik. Reformasi kurikulum diperlukan agar dapat mendukung keterlibatan politik yang lebih bermakna di kalangan generasi muda. Dengan demikian, pendidikan politik yang tepat diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam demokrasi dan pembangunan bangsa.

***Kata kunci: Pendidikan Politik, Generasi Muda, Kurikulum***

### **ABSTRACT**

*This research discusses the importance of the political education curriculum for the younger generation. Political education is a key element in the formation of citizens who are active, critical and participate in democratic life. This study shows that an effective political education curriculum must include basic knowledge of political systems, critical thinking skills, practical political participation, and relevance to contemporary social and political issues. Apart from that, digital literacy is also an important part of political education in the information era which is full of misinformation challenges. The method in this research is using a literature review, which is a systematic, explicit and reproducible method for identification. The results of the study show that the political education curriculum in Indonesia still needs to be improved, especially in terms of the relevance of the material and a more applicable approach to increasing the younger generation's interest in politics. Curriculum reform is needed to support more meaningful political involvement among the younger generation. Thus, it is hoped that appropriate political education can prepare the younger generation to play an active role in democracy and nation building.*

***Keywords: Political Education, Young Generation, Curriculum***

### **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan politik memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda sebagai warga negara yang aktif, kritis,

dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, generasi muda diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai untuk dapat terlibat secara konstruktif

dalam proses pengambilan keputusan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik tidak hanya mencakup aktivitas seperti pemungutan suara, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan bertindak atas berbagai isu sosial dan politik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik sebagai upaya untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan politik yang esensial.

Pada Negara Indonesia, rendahnya partisipasi politik di kalangan generasi muda sering menjadi sorotan berbagai penelitian. Media sosial telah meraih popularitas besar dan digunakan secara luas oleh masyarakat karena memberikan kemampuan kepada individu dengan cepat dan tanpa kesulitan berbagi gagasan dan informasi (Susanto, 2017). Sebagian besar pemilih muda terjebak pada politik identitas atau politik transaksional yang cenderung mengabaikan substansi kebijakan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengetahuan politik generasi muda dengan tuntutan partisipasi politik yang berkualitas.

Kurikulum pendidikan politik yang dirancang dengan baik dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Mengacu pada pandangan Kerr (2003), pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pendidikan politik harus memberikan siswa pengetahuan tentang sistem politik, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta keterampilan untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik. Oleh karena itu, perlu ada kurikulum yang komprehensif yang tidak hanya menekankan pada aspek teoretis politik, tetapi juga aspek praktis yang dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda.

Namun, kurikulum pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahab (2016), meskipun pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian dari kurikulum formal di sekolah, materi yang disampaikan sering kali kurang relevan dengan kondisi politik saat ini dan kurang mampu menarik minat generasi muda. Kurikulum yang ada cenderung bersifat normatif dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk

mengeksplorasi isu-isu politik yang lebih kontemporer dan kritis. Ini berpotensi menyebabkan apatisme politik di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan demokrasi.

Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga menuntut adanya inovasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan politik. Generasi muda yang tumbuh dalam era digital memiliki akses yang luas terhadap informasi politik, tetapi mereka juga rentan terhadap misinformasi dan polarisasi politik di media sosial. Menurut Barber (2014), pendidikan politik harus mencakup literasi digital yang bertujuan untuk membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menganalisis informasi politik secara kritis dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda serta merumuskan komponen-komponen penting yang perlu ada dalam kurikulum tersebut. Artikel ini juga akan membahas bagaimana kurikulum pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan non-formal, serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya generasi muda yang melek politik dan siap berpartisipasi dalam demokrasi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain literatur review atau kajian kepustakaan. *Literature review* merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik atau isu tertentu (Marzali, 2016).

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda memiliki berbagai elemen penting yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan demokrasi. Kurikulum ini tidak hanya harus mencakup aspek pengetahuan politik dasar, tetapi juga

mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, keterampilan partisipasi politik praktis, serta pemahaman mengenai konteks sosial dan politik kontemporer.

### **1. Pengetahuan Dasar tentang Sistem Politik dan Demokrasi**

Studi yang dilakukan oleh Kerr (2003) menekankan pentingnya kurikulum pendidikan politik untuk memberikan pemahaman mendasar tentang struktur dan fungsi sistem politik. Pengetahuan ini meliputi pengenalan terhadap lembaga-lembaga politik, proses pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa pemahaman ini, generasi muda cenderung kesulitan memahami dinamika politik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, materi dasar mengenai sistem politik harus menjadi komponen utama dalam kurikulum pendidikan politik. Wahab (2016) menambahkan bahwa pengetahuan ini juga harus mencakup isu-isu global agar siswa memahami posisi negaranya dalam konteks internasional.

### **2. Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis**

Pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan politik telah banyak dibahas dalam literatur. Sebagai contoh, Gutmann (1999) menyatakan bahwa pendidikan demokratis harus membekali siswa dengan kemampuan untuk menganalisis informasi politik secara kritis dan mengembangkan argumen yang berdasar. Dalam era informasi digital saat ini, keterampilan ini menjadi semakin penting, mengingat generasi muda terpapar oleh berbagai macam informasi dari media sosial yang sering kali tidak terverifikasi. Barber (2014) juga menekankan bahwa kurikulum pendidikan politik harus mengajarkan siswa untuk tidak hanya memahami informasi politik, tetapi juga mengevaluasinya secara kritis, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta yang valid.

### **3. Keterampilan Partisipasi Politik**

Kurikulum pendidikan politik tidak hanya harus fokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus mendorong partisipasi politik praktis.

Menurut Verba, Scholzman, dan Brady (1995), salah satu indikator keberhasilan pendidikan politik adalah peningkatan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan politik, baik dalam bentuk pemungutan suara, kampanye politik, maupun aktivisme sosial. Pendidikan politik yang efektif harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih partisipasi politik, misalnya melalui simulasi pemilu, diskusi kebijakan, atau keterlibatan dalam organisasi sekolah yang berhubungan dengan politik. Hal ini dapat membantu siswa memahami bagaimana teori politik diterapkan dalam praktik serta mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam kehidupan politik yang sesungguhnya.

### **4. Relevansi dengan Isu Sosial dan Politik Kontemporer**

Studi kepustakaan juga menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan politik harus relevan dengan kondisi sosial dan politik yang dihadapi oleh generasi muda. Susanto (2018) menemukan bahwa banyak siswa merasa tidak tertarik dengan politik karena kurikulum yang mereka pelajari tidak menyentuh isu-isu yang mereka anggap relevan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbarui secara berkala untuk mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari generasi muda. Dengan memasukkan isu-isu ini ke dalam kurikulum, pendidikan politik dapat menjadi lebih menarik dan kontekstual bagi siswa.

### **5. Pendidikan Politik dalam Konteks Digital**

Era digital telah membawa tantangan baru dalam penyampaian pendidikan politik. Literasi digital menjadi elemen penting dalam pendidikan politik modern, terutama karena generasi muda sangat aktif dalam menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik. Menurut Barber (2014), kurikulum pendidikan politik harus melibatkan pengajaran tentang bagaimana menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan bagaimana mengenali berita palsu atau misinformasi. Hal ini sangat penting agar generasi muda dapat memilah informasi yang

valid dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang semakin meningkat di media sosial.

## **6. Peran Lembaga Pendidikan dan Pemerintah**

Kajian pustaka menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, terutama sekolah, memainkan peran sentral dalam penyampaian kurikulum pendidikan politik. Wahab (2016) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah formal menjadi media utama untuk memperkenalkan materi politik kepada siswa. Namun, partisipasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk mendukung inisiatif pendidikan politik di luar sekolah. Program pendidikan politik non-formal, seperti pelatihan kepemimpinan atau diskusi publik, dapat menjadi sarana tambahan untuk memperkuat pemahaman politik generasi muda.

## **7. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Politik di Indonesia**

Berdasarkan hasil kajian pustaka, kurikulum pendidikan politik di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Wahab (2016) menunjukkan bahwa materi politik yang diajarkan di sekolah masih terlalu normatif dan cenderung teoritis, sementara aspek-aspek praktis dari partisipasi politik sering kali terabaikan. Sementara itu, Susanto (2018) mengamati bahwa banyak siswa yang apatis terhadap politik karena kurikulum tidak membangkitkan minat mereka. Ini menuntut adanya reformasi kurikulum yang lebih kontekstual, interaktif, dan relevan dengan perkembangan politik kontemporer serta kebutuhan generasi muda.

Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah Fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi Agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana generasi muda, Mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran Politik yang diharapkan dari mereka. Keduanya memiliki hubungan yang Dinamis.

Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi.

Semua pihak memiliki peran sebagai penyelenggara pendidikan politik, kita semua memainkan peran penting dalam mendorong generasi muda agar tertarik dan terlibat aktif pada terselenggaranya pemerintahan negara. Namun, perlu diingat, bahwa pemuda bukanlah kelompok yang homogen, dan dalam keragamannya, akan menerima pendekatan yang berbeda untuk belajar tentang demokrasi dan proses terselenggaranya pemerintahan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan politik lainnya, termasuk kampus, media dan—yang terpenting, kaum muda itu sendiri—akan menghasilkan metode yang paling efektif untuk menjangkau sub kelompok sasaran. Karena kaum muda sendiri bisa menjadi pencipta, pelaksana serta penerima manfaat pendidikan politik.

Generasi muda Indonesia memprotes korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Mereka berjuang untuk pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik untuk semua generasi. Pemuda menuntut representasi politik dan suara dalam kebijakan pemerintah. Namun, mereka seringkali memiliki banyak keraguan untuk terlibat pada proses politik formal.

Di arena politik, generasi muda tunduk pada mitos yang menyebar dan terkadang kontradiktif. Mereka sering digambarkan dalam salah satu/atau istilah—sebagai korban atau pelaku kekerasan, atau sebagai apatis atau terlibat ketika kenyataannya jauh lebih kompleks dan menentang stereotip tersebut.

Padahal, keterlibatan luas generasi muda dalam pengambilan keputusan politik dan implementasi dianggap penting untuk demokrasi yang hidup. Partisipasi atau keterlibatan politik dapat merujuk pada berbagai kegiatan, termasuk partisipasi formal seperti pemungutan suara, bergabung dengan partai politik, atau mencalonkan diri untuk jabatan publik dan partisipasi informal, seperti menandatangani petisi, dan membeli atau memboikot produk karena alasan politik. Untuk melakukan kanalisasi anak muda ke politik formal.

Kurikulum pendidikan politik merupakan bagian penting dari pendidikan juga berperan

sebagai instrumen untuk mengembangkan kemampuan generasi muda dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang dikatakan St. John-Matthews, Robinson, Martin, Newton, & Grant (2020) yang menyatakan bahwa desain kurikulum merupakan aspek penting dari pendidikan termasuk peserta didik yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan oleh kurikulum. Dalam hal yang berbeda untuk belajar tentang demokrasi dan proses terselenggaranya pemerintahan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan politik lainnya, termasuk kampus, media dan—yang terpenting, kaum muda itu sendiri—akan menghasilkan metode yang paling efektif untuk menjangkau sub kelompok sasaran. Karena kaum muda sendiri bisa menjadi pencipta, pelaksana serta penerima manfaat pendidikan politik.

Generasi muda Indonesia memprotes korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Mereka berjuang untuk pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang lebih baik untuk semua generasi. Pemuda menuntut representasi politik dan suara dalam kebijakan pemerintah. Namun, mereka seringkali memiliki banyak keraguan untuk terlibat pada proses politik formal.

Di arena politik, generasi muda tunduk pada mitos yang menyebar dan terkadang kontradiktif. Mereka sering digambarkan dalam salah satu/atau istilah—sebagai korban atau pelaku kekerasan, atau sebagai apatis atau terlibat ketika kenyataannya jauh lebih kompleks dan menentang stereotip tersebut.

Padahal, keterlibatan luas generasi muda dalam pengambilan keputusan politik dan implementasi dianggap penting untuk demokrasi yang hidup. Partisipasi atau keterlibatan politik dapat merujuk pada berbagai kegiatan, termasuk partisipasi formal seperti pemungutan suara, bergabung dengan partai politik, atau mencalonkan diri untuk jabatan publik dan partisipasi informal, seperti menandatangani petisi, dan membeli atau memboikot produk karena alasan politik. Untuk melakukan kanalisasi anak muda ke politik formal.

Kurikulum pendidikan politik merupakan bagian penting dari pendidikan juga berperan sebagai instrumen untuk mengembangkan

kemampuan generasi muda dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang dikatakan St. John-Matthews, Robinson, Martin, Newton, & Grant (2020) yang menyatakan bahwa desain kurikulum merupakan aspek penting dari pendidikan termasuk peserta didik yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan oleh kurikulum. Dalam hal mengembangkan kemampuan peserta didik, kurikulum juga di harapkan mampu mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik untuk menjadi panduan warga negara dalam memahami setiap informasi yang sangat kompleks. Dalam hal ini Hysing (2015) menyatakan bahwa dilema utama dalam perencanaan bagaimana memungkinkan perubahan untuk keberlanjutan jangka panjang adalah legitimasi politik dan proses demokrasi. Permasalahan yang menjadi dasar dalam kajian ini adalah pentingnya kurikulum pendidikan politik yang bernuansa global bagi generasi muda.

#### **IV. KESIMPULAN**

kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang sadar, kritis, dan partisipatif. Kurikulum ini perlu dirancang secara komprehensif dengan memasukkan beberapa elemen kunci, seperti pengetahuan dasar tentang sistem politik dan demokrasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan partisipasi politik praktis. Selain itu, penting bagi kurikulum untuk relevan dengan isu-isu sosial dan politik kontemporer, serta memberikan literasi digital yang memadai agar generasi muda mampu memilah informasi yang valid di era media digital.

Kajian juga menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diterapkan saat ini di Indonesia masih bersifat normatif dan kurang relevan dengan kebutuhan serta minat generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang lebih interaktif, kontekstual, dan aplikatif untuk meningkatkan minat serta partisipasi politik generasi muda. Reformasi ini harus melibatkan tidak hanya lembaga pendidikan formal, tetapi juga peran pemerintah dan organisasi masyarakat sipil

dalam menyediakan pendidikan politik yang lebih inklusif dan efektif.

Dengan adanya kurikulum pendidikan politik yang baik, generasi muda diharapkan dapat memahami dinamika politik, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan politik di masa depan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Barber, B. R. (2014). *If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities*. Yale University Press.

Gutmann, A. (1999). *Democratic Education*. Princeton University Press.

Hysing, M. et al. (2015).: *Sleep and Use Of Electronic Devices in Adolescence: Results From A Large Population-Based Study*, *BMJ Open*, 5(1), pp. 1–7.

Kerr, D. (2003). *Citizenship Education in England: The Making of a New Subject*. *JSSE-Journal of Social Science Education*, 2(1), 5-16.

St. John-Matthews, J., Robinson, L., Martin, F., Newton, P. M., & Grant, A. J. (2020). *Crowdsourcing: A novel tool to elicit the student voice in the curriculum design process for an undergraduate diagnostic radiography degree programme*. *Radiography*. (26), 2S54-S61

Susanto. E.K., (2017). *Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik*. *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 3, hlm 379-398 : jurnal aspikom

Sugihastuti, Itsna Hadi Saptiawan. 2010. *Gender&Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

Wahab, A. (2016). *Konsep Dasar Pendidikan IPS*. Universitas Terbuka.